
“MENJEMPUT KERINDUAN KELUARGA” PENYELESAIAN DAN PENGEMBALIAN TAHANAN POLITIK PULAU BURU KE MASYARAKAT, 1965-1979

Sarkawi B. Husain

Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga

Abstrak

Salah satu dampak lanjutan dari peristiwa G 30 S adalah ditahannya ribuan orang yang dianggap sebagai simpatisan PKI. Sebagian besar dari mereka dibuang dan diasingkan ke Pulau Buru. Namun demikian, pada Desember 1977 dimulai pemulangan. Salah satu persoalan utama yang dihadapi para bekas tahanan politik adalah penerimaan keluarga dan masyarakat. Pada saat mereka harus menghidupi kembali keluarganya tidak jarang mereka menemukan kendala. Tulisan ini melihat bagaimana proses penahanan yang dialami oleh para tahanan politik hingga diasingkan di Pulau Buru, dan melihat juga proses pemulangan dan situasi yang dihadapinya sesudah pemulangan.

Kata Kunci: Tahanan Politik, PKI, Pulau Buru

Abstract

One of the further effects of the G30S was the arrest of thousands of people who were considered PKI sympathizers. Most of them were banished and exiled to Buru Island. However, in December 1977 repatriation began. One of the main problems faced by former political prisoners was their acceptance by their families and communities. When they had to work to support their families, they often found obstacles. This paper looks at the processes political prisoners had to go through, from their arrest, banishment in Buru Island, and it also looks at the repatriation process and the difficult circumstances they had to face once they returned.

Keywords: Political Prisoners, PKI, Buru Island

PENDAHALUAN

Nopember 1977, televisi di mako yang mulai diperbolehkan kami tonton, memberitakan bahwa 1500 tapol Pulau Buru akan dibebaskan pada 15 Desember tahun itu. ... Kabar gembira? Mungkin ada di antara kami, para tapol di Pulau Buru ini, yang merasakan itu. Namun yang lebih terasa adalah sikap pesimistis. (Krisdianto, 2015: 178)

Kutipan di atas adalah penggalan memoar Oei Hiem Hwie, salah seorang tahanan yang dianggap terlibat atau mendukung Gerakan 30 September yang harus dibuang ke Pulau Buru. Pengalaman Oei Hiem Hwie adalah salah satu pengalaman yang berhasil dituangkan dalam bentuk tulisan. Ada ribuan atau bahkan puluhan ribu pengalaman lain yang tidak ditulis dengan berbagai alasan, antara lain trauma dengan suara mesin ketik, maut telah menjemput mereka sebelum mereka menuliskannya atau sudah tidak mau mengingat masa lalu mereka yang kelam. Sejarah kelam Partai Komunis Indonesia (PKI) telah berlangsung lama. Pada tahun 1920, partai ini didirikan dan hampir setengah abad lalu menjadi partai dan organisasi terlarang di Indonesia (Tickell, 2017: xvii).

Sejarah PKI telah menjadi kajian banyak sarjana, baik akademisi dari luar maupun dalam negeri. Pada tahun 1965, Ruth McVey menulis *The Rise of Indonesian Communism* dan pada tahun 1990, Takashi Shiraishi menulis *An Age in Motion*. Dua buku yang disebut tersebut merupakan buku klasik sejarah Indonesia yang membahas bangkitnya organisasi politik yang awal di Indonesia dengan detail. Selain dua kajian tersebut, terdapat sejumlah tulisan dari kalangan sarjana Indonesia sendiri, seperti Mestika Zed, *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927* (2004), Soewarsono, *Berbareng Bergerak; Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Semaoen* (2000), John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* (2008), Dahlia Gratia Setiawan, *The Cold War in the City of Heroes: S.-Indonesian Relations and Anti-Communist Operations in Surabaya, 1963-1965* (2014) dan berbagai tulisan lainnya.

Sayang sekali, tidak banyak tulisan yang membicarakan proses pemulangan para tahanan dari Pulau Buru atau berbagai tempat lainnya yang dianggap terlibat atau mendukung Gerakan 30 September. Padahal, sepanjang tahun 1976 hingga 1979, berbagai surat kabar dan majalah memberitakan tentang pemulangan para tahanan PKI dari Pulau Buru. Dalam Harian *Kompas*, 28 Desember 1977 misalnya, diberitakan bahwa 1501 bekas tahanan G30 S golongan B di Pulau Buru tiba di Surabaya (*Kompas*, 28 Desember 1977). Mereka disambut dengan sukacita oleh keluarga mereka, walaupun sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Sementara itu, majalah berbahasa Jawa, *Jaya Baya* dalam terbitannya 24 Desember 1977 melaporkan bahwa 10.000 tahanan politik G 30 S/PKI dibebaskan dan menyusul 20.000 akan dibebaskan pada tahun 1978 dan 1979 (*Jaya Baya*, 24 Desember 1977). Sepanjang tahun 1969-1976, tidak kurang dari 11.948 orang tahanan politik G 30 S-PKI dibuang ke Pulau Buru. Sejak saat itulah Buru terkenal. Kata “Buru” menjadi sama dengan “Digul” atau “Selong” (Setiawan, 2004: 498).

Bertitik tolak dari uraian di atas, artikel ini mengungkap beberapa hal berkaitan dengan pemulangan para tahanan yang dianggap terlibat atau mendukung Gerakan 30 September. Artikel ini juga bertujuan untuk: 1) mengetahui bagaimana keluarga dan masyarakat menerima kehadiran para tahanan politik G 30 S-PKI; 2) menganalisis dasar yang digunakan oleh pemerintah sehingga mengeluarkan kebijakan pemulangan para tahanan PKI; dan 3) mengetahui reaksi dan penerimaan keluarga dan masyarakat terhadap anggota keluarga mereka yang baru pulang menjalani pembuangan sebagai tahanan PKI.

STUDI SEBELUMNYA

Subjek yang berkaitan dengan persoalan PKI adalah tema yang banyak menarik perhatian ilmuan asing maupun Indonesia. Sayang sekali karya-karya yang ada lebih banyak menyoroti aspek-aspek yang berkaitan dengan siapa pelaku gerakan, apakah militer terlibat dalam gerakan, dan apakah pihak luar negeri terlibat dalam gerakan. Tidak banyak peneliti yang menaruh perhatian pada proses pembuangan para tahanan politik ke Pulau Buru misalnya, bagaimana kehidupan sehari-hari mereka di tempat pembuangan, dan mengapa akhirnya pemerintah mengambil sikap untuk memulangkan mereka dari tempat pembuangan.

Di tengah keterbatasan kajian tersebut, terdapat dua karya penting dan menarik tentang kehidupan para tahanan politik G 30 S-PKI di Pulau Buru. Menariknya, kedua karya itu ditulis oleh dua orang yang pernah menjadi korban pembuangan. Pertama, buku atau tepatnya catatan kehidupan yang ditulis oleh Hersri Setiawan yang berjudul *Memoar Pulau Buru* (Setiawan, 2004). Seperti judulnya, buku yang diterbitkan pada tahun 2004 ini sebagian besar bercerita tentang pengalaman penulis saat menjadi tahanan politik Orde Baru, proses dan kehidupan selama di Pulau Buru, dan saat menjadi orang bebas tapi tetap menyandang status Eks Tahanan Politik.

Buku kedua yang juga bercerita tentang pengalaman tahanan politik di Pulau Buru adalah sebuah buku yang berjudul *Memoar Oei Hiem Hwie* yang diedit oleh Heru Krisdianto (Krisdianto, 2015). Buku ini menarik tidak hanya karena kesaksian Oei Hiem Hwie selama di Pulau Buru, tetapi juga karena beliau adalah orang Tionghoa yang sesaat setelah terjadinya G 30 S menjadi kelompok masyarakat yang banyak dicurigai dan dituduh sebagai kelompok yang terlibat atau mendukung PKI. Pada bagian terakhir buku ini, terdapat beberapa lampiran yang sangat penting bagi riset saya antara lain dokumen atau surat pembebasan dari Kopkamtibda Jawa Timur, 1978 dan Surat Kopkamtib tentang pengembalian tahanan golongan B ke masyarakat, 1978. Buku ketiga yang membahas secara luas tentang tahanan politik Pulau Buru adalah buku yang berjudul *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)* yang ditulis oleh I.G. Krisnadi (Krisnadi, 2001). Buku yang semula merupakan tesis penulis ini dibagi atas tujuh bab. Bagian terakhir dari buku ini memiliki relevansi dengan studi penulis. Hanya saja terdapat beberapa informasi baru terutama dari wawancara saya dengan salah seorang mantan tahanan politik bernama Oei Hiem Hwie yang belum ada dalam buku ini. Namun demikian, buku ini memberikan banyak informasi berharga, sehingga banyak informasi penting yang penulis ambil dari buku ini. Dalam buku ini terdapat juga beberapa peta yang sangat bermanfaat dalam riset saya.

Buku yang tidak kalah pentingnya adalah memoar dari seorang mantan tahanan politik yang berjudul: *Tiada Jalan Bertabur Bunga: Memoar Pulau Buru dalam Sketsa*. Sesuai dengan judulnya, buku ini banyak memuat sketsa yang dibuat sendiri oleh penulis yang menggambarkan suasana, sejak kedatangan hingga masa-masa selama berada di Pulau Buru (Goenito, 2016). Sementara itu, buku atau hasil riset yang bertemakan tentang PKI banyak dilakukan, baik oleh ilmuan asing maupun Indonesia. Pada tahun 1997, sebuah buku karya Takashi Shiraishi yang berjudul *Zaman Bergerak* diterbitkan oleh Pustaka Utama Grafiti (Shiraishi, 1997). Buku ini dapat dikatakan sebagai salah satu buku babon dalam sejarah pergerakan Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Ruth McVey dalam *endorsment*, buku ini tidak hanya penting bagi ahli-ahli Asia Tenggara, tetapi juga bagi studi perbandingan tentang perubahan ideologi. Buku ini berbicara tentang periode awal dalam transisi pemikiran tradisional dan modern, serta pertalian agama, nasionalisme, dan radikalisme sosial (McVey, 1997: 506).

Selain buku-buku di atas, beberapa buku juga ditulis oleh pentolan PKI dan

menarik untuk ditelaah. Buku itu antara lain karya D.N. Aidit yang berjudul *Kobarkan Semangat Banteng* dan *Aidit Menggugat Peristiwa Madiun* (Aidit, 1964; 1955). Buku pertama dapat dikatakan sebagai buku propaganda, sedangkan buku kedua merupakan pembelaan Aidit atas peristiwa Madiun. Senada dengan pembelaan Aidit, dapat juga dibaca buku lain yang berjudul *Buku Putih tentang Peristiwa Madiun* yang disusun dan diterbitkan oleh Departemen Agitprop CC PKI (Departemen Agitprop CC PKI, 1954).

METODE

Artikel ini menghimpun berbagai data tentang para tahanan PKI yang akhirnya dikembalikan kepada keluarga mereka dan ke masyarakat. Salah satu data utama yang dihimpun adalah mereka yang dibuang ke Pulau Buru. Setelah puluhan tahun kembali dari pembuangan, beberapa dari mereka menulis sebuah memoar yang menceritakan pengalaman mereka, mulai dari proses “pengambilan” hingga dibuang ke berbagai tempat terutama ke Pulau Buru.

Data yang berhasil dikumpulkan terdiri atas dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui serangkaian wawancara. Wawancara dilakukan dengan mereka yang pernah mengalami penahanan dan pembuangan ke Pulau Buru dan tempat lainnya. Hal ini penting dilakukan agar diperoleh keterangan dari tangan pertama sehingga keterangan yang diperoleh betul-betul valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, peneliti mengumpulkan data dari berbagai surat kabar dan majalah, khususnya yang berkaitan dengan dasar kebijakan pemerintah melakukan pemulangan dan reaksi masyarakat dan keluarga atas para tahanan yang kembali ke tengah-tengah mereka.

Data yang telah terkumpul, baik melalui wawancara mendalam maupun lewat pengumpulan arsip dan surat kabar, selanjutnya diklasifikasi berdasarkan pemilahan tujuan-tujuan penelitian. Data yang telah diklasifikasi dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan diharapkan akan menghasilkan pembahasan yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini merupakan penggabungan antara penelitian historis dan sosiologis (*historical and sociological research*). Penelitian historis sangat bermanfaat untuk memahami proses para tahanan mengalami “pengambilan”, dibuang ke Pulau Buru dan tempat lainnya, dan proses pemulangan mereka ke keluarga dan masyarakat. Namun demikian, penelitian jenis ini umumnya lebih berkonsentrasi pada urutan kronologis atau diakronis, sedangkan aspek-aspek yang sifatnya sinkronis kurang mendalam. Oleh karena itu, kedua aspek tersebut (diakronis maupun sinkronis) dilakukan secara lebih berimbang dan saling melengkapi.

MENUJU PULAU BURU

Dari seluruh pulau dalam gugusan pulau di Maluku, Pulau Buru adalah pulau terbesar ketiga. Pulau terbesar pertama adalah Seram (18.625 km²); Pulau Halmahera (18.000 km²), dan Pulau Buru (13.200 km²). Sebagian besar wilayah Pulau Buru berdataran tinggi, khususnya di sebelah Utara, Barat, Selatan, dan Tenggara (Krisnadi, 2001: 14-15). Dari segi geografis, pulau ini memang terpencil dan tidak dihuni oleh penduduk. Mungkin karena kondisi inilah yang menyebabkan pemerintah memilih pulau ini sebagai tempat pembuangan para tahanan politik.

Pulau inilah yang dituju oleh para tahanan politik. Perjalanan mereka ke pulau ini dimulai saat mereka mendarat di Teluk Namlea. Salah seorang mantan tahanan politik bernama Gregorius Soeharsojo Goenito menceritakan pengalaman beliau sebagai berikut.

Pulau inilah yang dituju oleh para tahanan politik. Perjalanan mereka ke pulau ini



Gambar 2. Peta Pulau Buru

Sumber: I.G. Krisnadi. *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*. (Jakarta: LP3ES, 2001)

dimulai saat mereka mendarat di Teluk Namlea. Salah seorang mantan tahanan politik bernama Gregorius Soeharsojo Goenito menceritakan pengalaman beliau sebagai berikut.

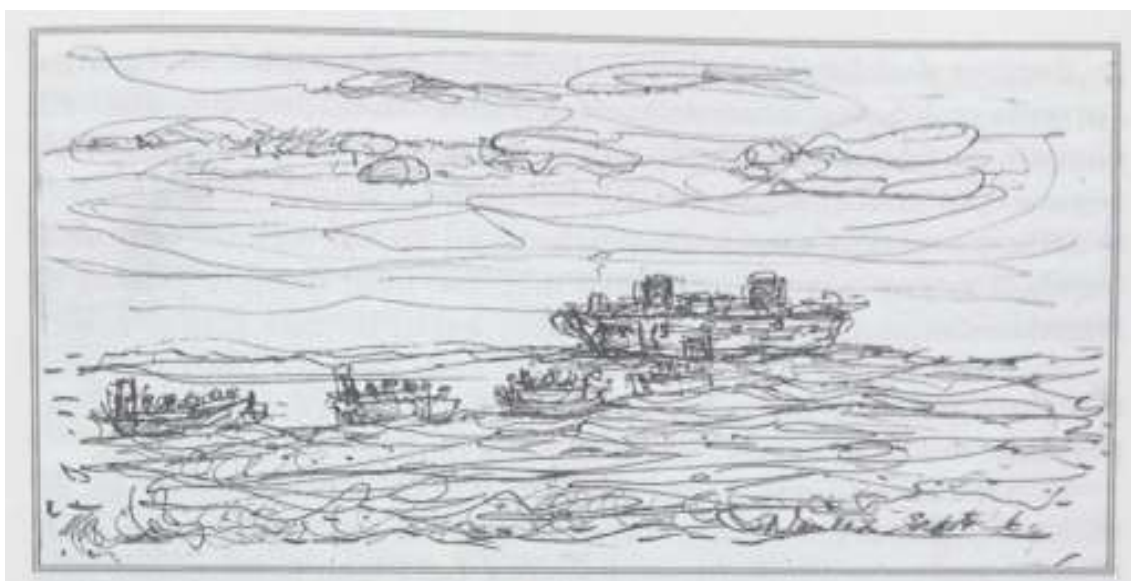
Berangkat dari Pelabuhan Sodong, Nusakambangan, pada hari Sabtu, 16 Agustus 1969. Perjalanan sebelas hari. Sampailah tampak memutih bangunan dari kejauhan -pulau hijau membulat melingkar tapal kuda. Kapal tidak bisa merapat. Semua mengemasi barang-barang bawaannya masing-masing, persiapan untuk turun pada pagi hari itu.

Tentara-tentara berkulit gelap Yon Pattimura berjajar siap di sepanjang pelabuhan....

Barisan penjaga peloton pengawal bersenjata lengkap menjaga ketat kanan dan kiri

di sepanjang pantai teluk. Bahkan, di bukit-bukit mereka kurang siap siaga menghadapi atau menyambut kedatangan warga tahpol dari Pulau Jawa. (Goenito, 2016: 18-19)

Setelah dilakukan pengecekan satu persatu bersama barang bawaannya, para tahanan politik diangkut dengan truk yang berkapasitas 30 orang menuju barak-barak yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Rombongan pertama sejumlah lima ratus orang antara lain lima puluh dari Jakarta Raya, Rumah Tahanan Khusus (RTC); lima puluh dari Jawa Tengah, Solo, Yogyakarta, Semarang. Dari Jawa Timur sejumlah empat ratus orang; terdiri atas Kota Surabaya, Bojonegoro, Lamongan, Babat, Tuban, Blitar, Malang, dan Madiun (Goenito, 2016: 20-21). Suasana pendaratan kapal yang mengantar mereka digambarkan oleh Goenito melalui sketsa berikut (Gambar 2).



Gambar 2. Sketsa Pendaratan Tahanan Politik di Teluk Namlea

Sumber: Gregorius Soeharsojo Goenito, *Tiada Jalan Bertabur Bunga, Memoar Pulau Buru dalam Sketsa* (Yogyakarta: Insist Press, 2016), hlm. 19

Berbeda dengan Gregorius yang berangkat dari Nusakambangan ke Pulau Buru, salah seorang tahanan politik yang penulis temui yang bernama Oei Hiam Hwie menceritakan bahwa ia berangkat dari penjara Lowokwaru menuju Pulau Buru. Beliau meninggalkan penjara Lowokwaru pada tanggal 11 Juli 1970. Oei Hiam Hwie bersama 200 tahanan politik, diangkut dengan lima truk menuju Surabaya. Setelah sehari-hari terombang-ambing di tengah lautan, pada tanggal 19 November 1970, para tahanan politik tiba di pelabuhan Sodong dengan berjalan kaki dan memikul barang-barang bawaan menuju Selat Nusakambangan. Setelah enam hari mengarungi lautan, pada tanggal 25 November 1970 Oei Hiam Hwie sampai di Pulau Buru (wawancara Oei Hiam Hwie, 29 Juli 2017). Sejak saat itulah Oei Hiam Hwie dan para tahanan politik lainnya menjalani masa tahanannya di Pulau Buru.

Selama menjalani hari-hari di Pulau Buru, para tahanan politik ditempatkan dalam delapan belas unit-unit Inrehab. Jumlah Inrehab ini ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Pangkopkamtib, pada Mei 1974 (Toer, 1995). Delapan belas unit Inrehab tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Nama-nama Inrehab Pulau Buru

No.	Nama Inrehab
1.	Wanapura
2.	Wanareja
3.	Wanayasa
4.	Savanajaya
5.	Wanakarta
6.	Wanawangi
7.	Wanasurya
8.	Wanakencana
9.	Wanamulya
10.	Wanadharma
11.	Wanaasri
12.	Birawa Wanajaya
13.	Giripura
14.	Bantalareja
15.	Indrapura
16.	Indrakarya
17.	Argabhakti
18.	Adhipura

Sumber: Pramoedya Ananta Tour, *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu: Catatancatatan dari Pulau Buru* (Kuala Lumpur: Wira Karya, 1995).

BEBERAPA PERTIMBANGAN PEMERINTAH BERKAITAN DENGAN PELEPASAN/ PEMULANGAN TAHANAN POLITIK

Tidak ada keterangan yang jelas dari pemerintah tentang apa yang menjadi pertimbangan pengembalian atau pemulangan tahanan politik Pulau Buru kepada keluarga dan kampung halaman masing-masing. Namun demikian, dari beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa terdapat dua penyebab pemulangan tersebut. Pertama, alasan kemanusiaan. Alasan ini disampaikan oleh Ketua DPR/MPR Adam Malik saat menerima delegasi Badan Kontak Eksponen Angkatan 66 di DPR pada 6 Desember 1977. Dia mengatakan bahwa: "... penglepasan tahanan G-30-S/PKI bisa diterima demi alasan kemanusiaan. Dari segi agama dan kemanusiaan tidak ada alasan untuk menahan mereka seterusnya" (*Kompas*, 7 Desember 1977).

Kedua, ketiadaan dasar hukum. Menurut Adam Malik, pemerintah melepaskan tahanan tersebut karena sampai sekarang tidak ada undang-undang yang mengharuskan penahanan seterusnya (*Kompas*, 7 Desember 1977). Dia mengatakan lebih jauh:

"Kalau dulu semua orang itu dibunuh dan mati, tentu tidak ada soal. Tapi bila setelah ditahan dan diperiksa, ternyata tidak ada alasan lagi untuk menahan mereka, mengapa mereka tidak kita lepaskan? ... cara yang paling tepat untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak haruslah dengan pengadilan. Pengadilan itu sudah kita jalankan. Kalau terbukti yang kita tuduh tidak bersalah atau sudah

saatnya dilepaskan, mengapa kita masih mau menahannya?” (*Kompas*, 7 Desember 1977)

Sinyalemen Adam Malik tentang tidak adanya undang-undang yang mengharuskan pemerintah untuk menahan seterusnya tahanan politik G 30 S/PKI adalah benar, karena hingga dimulainya pelepasan tahanan tersebut tidak ada undang-undang yang dimaksud. Bahkan menurut Asvi Warman Adam, tindakan penahanan itu justru diduga sebagai bentuk pelanggaran berat HAM seperti yang diatur dalam UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM. Asvi menuturkan bahwa paling tidak terdapat enam bentuk pelanggaran, yakni: 1) pemindahan paksa melanggar pasal 9 huruf d, UU no 26/2000; 2) penempatan dalam kamp isolasi termasuk dalam perampasan kemerdekaan dan perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang sehingga melanggar ketentuan pokok hukum internasional serta melanggar pasal 9 huruf e, UU no. 26/2000; 3) perbudakan dan kerja paksa yang dilakukan di Pulau Buru melanggar pasal 9 huruf e, UU no. 26/2000; 4) Kekerasan dalam kamp penahanan di Pulau Buru terdiri dari pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan dan isolasi. Ini melanggar pasal 9 huruf a,f,h dan i, UU no 26/2000; 5) “Tindakan-tindakan tidak manusiawi lainnya; Pengurangan Pangan dan Fasilitas Kesehatan.” Tindakan ini melanggar Statuta Roma mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan karena berkaitan erat, sehingga menimbulkan konsekuensi tidak terelakkan maupun penyebab dari tindakan-tindakan kejahatan sebelumnya; dan 6) bahwa kejahatan itu bersifat sistematis dan meluas (Adam, 2004: 2).

Ketiga, tekanan politik internasional. Menurut Oei Hiem Hwie, tekanan yang dimaksud adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia yang gencar dilakukan oleh negara-negara Barat dan penyebaran modal. Indonesia di bawah rezim Orde Baru yang didukung oleh negara-negara Barat merupakan negara dunia ketiga yang menjadi lahan subur bagi investasi modal luar negeri. Akan tetapi, jumlah tahanan politik yang sangat banyak menjadi kendala atas investasi itu. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintahan Soeharto untuk segera membebaskan para tahanan politik. Lebih jauh, Amerika Serikat sebagai aktor utama negara-negara Barat menekan Indonesia dengan kemungkinan penghentian beberapa paket bantuan bila pembebasan tapol masih ditunda-tunda. Dengan tekanan itu, termasuk dari IGGI, Amnesti Internasional dan opini internasional berhasil memaksa Indonesia untuk membebaskan para tahanan politik (Krisdianto, 2015: 179).

PROSES PEMULANGAN DAN REAKSI MASYARAKAT DAN KELUARGA ATAS PEMULANGAN TAHANAN POLITIK

Pembebasan Tahun 1977

Dalam Gambar 3, tampak seorang tahanan politik (tapol) Pulau Buru yang dibebaskan dijemput oleh dua orang sanak saudaranya. Foto yang mengharukan tersebut adalah bagian dari tahanan politik Pulau Buru yang dikembalikan pemerintah kepada keluarga dan kampung halaman mereka masing-masing. Rencana pemulangan tahanan politik dari Pulau Buru mulai santer terdengar di kalangan tapol pada November 1977. Hal ini misalnya diketahui dari penuturan Oei Hiam Hwie berikut:

November 1977, televisi di mako yang mulai diperbolehkan kami tonton, memberitakan bahwa 1500 tapol Pulau Buru akan dibebaskan pada 15 Desember tahun itu. Sebelumnya para pejabat telah banyak bicara tentang kemungkinan

pembebasan kami yang disusul pendataan ulang para tapol (Heru Krisdianto, 2015: 178).



Gambar 3. Seorang Tahanan Politik Dijemput oleh Keluarganya
Sumber: *Jaya Baya*, no. 49/XXXII, 6 Agustus 1978, hlm. 38.

Akan tetapi, berita ini ditanggapi dengan beragam oleh para tapol. Ada yang menganggapnya sebagai kabar gembira, ada yang biasa saja, bahkan ada yang pesimis. Oei Hiam Hwie misalnya, termasuk yang pesimis. Hal ini disebabkan oleh pengalamannya berpindah dari satu penjara ke penjara yang lain, dari kamp ke kamp membuat hati dan otaknya tidak terlalu percaya atas setiap berita pembebasan.

Namun demikian, kabar rencana pemulangan tersebut ternyata benar. Pada tanggal 20 Desember 1977 pembebasan tahap pertama terhadap para tahanan politik Pulau Buru tersebut mulai dilakukan. Majalah *Jaya Baya* melaporkan bahwa 10.000 tahanan politik G-30-S PKI golongan B, akan dibebaskan pada tanggal 20 Desember dan sisanya sebesar 20.000 akan dibebaskan pada tahun 1978 dan 1979 (*Kompas*, 28 Desember 1977: 1; *Jaya Baya*, 1 Januari 1978: 3).

Tujuh hari kemudian, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1977, 1501 orang bekas tahanan politik golongan B dari Instalasi Rehabilitasi (Inrehab) Pulau Buru tiba di Gapura Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Mereka yang dibebaskan pada tahap pertama ini, berasal dari berbagai daerah, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Barat (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Daerah Asal dan Kondisi Para Tahanan Pemulangan Tahap I

Daerah Asal		Kondisi Para Tahanan	
Jawa Timur	337	Sakit Parah	28
Jawa Tengah	545	Sakit Paru-paru	196
Jakarta	335	Perlu Perawatan Khusus	12
Jawa Barat	284	Sakit Ringan	300
Total	1501		536

Keterangan: Dari 337 tahanan yang berasal dari Jawa Timur, 177 orang di antaranya dari Kota Surabaya. **Sumber:** Diolah dari *Kompas*, 28-12-1977

Seperti yang tampak dalam Tabel 2, jumlah tahanan yang paling banyak dipulangkan pada tahap pertama ini berasal dari Jawa Tengah, disusul oleh Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta. Sebagian dari mereka yang dipulangkan tidak berada dalam kondisi sehat. Bahkan satu jam sebelum kapal yang mereka tumpangi bersandar di pelabuhan, seorang tahanan yang berasal dari Surabaya bernama Sudiono meninggal dunia akibat serangan jantung. Menurut penuturan temannya, Sudiono memang mengidap penyakit jantung tapi selama dalam perjalanan hampir seminggu dia sehat-sehat saja. Penyakit jantungnya justru kambuh secara mendadak akibat kegembiraannya yang meluap-luap karena tidak lama lagi akan bertemu dengan keluarganya (*Kompas*, 28 Desember 1977).



Gambar 4. Suasana Penurunan Jenazah Sudiono (Tahanan Politik Pulau Buru) di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. **Sumber:** Kompas, 28-12-1977.

Dari Pelabuhan Tanjung Perak mereka dibawa ke kantor-kantor Korem (Komando Resor Militer) dan selanjutnya diserahkan kepada keluarga mereka masing-masing melalui Kodim (Komando Distrik Militer). Bagi mereka yang akan pulang ke daerah lain di Jawa Timur (selain Surabaya) dan Jawa Tengah disediakan bus, sedangkan untuk mereka yang akan pulang ke Jawa Barat dan Jakarta diangkut dengan kereta api (Krisdianto, 2015: 178).



Gambar 5. Suasana Pertemuan Tahanan Politik Pulau Buru dengan keluarga mereka di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya **Sumber:** Kompas, 5-12-1978

Pembebasan Tahun 1978

Gambar 5 menunjukkan suasana haru-biru pertemuan antara tahanan politik Pulau Buru dengan keluarga mereka yang baru saja tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pada gelombang kedua ini sebanyak 1.350 bekas tahanan Golongan B tiba di Surabaya. Tentang proses pemulangan tahap kedua ini, Oei Hiam Hwie yang ikut dalam pemulangan menceritakan sebagai berikut:

... akhir Nopember 1978, kepala barak memerintahkan saya, juga ratusan kawan lain, untuk berkemas-kemas. Akan dipindah katanya. Kabar bahwa ini adalah pembebasan gelombang kedua menguat di diri saya.

Saya menemui Pak Pram di tempatnya, mengabarkan kemungkinan pembebasan itu sekaligus berpamitan kepadanya. Pak Pram menitipkan beberapa salinan naskah-naskahnya untuk saya bawa pulang ke Jawa.

....

Dua hari kemudian, kami dipanggil satu-persatu, disuruh apel di depan barak, kemudian diperintahkan menuju mako. Di sini kami berkumpul dengan tapol dari unit lain, ribuan jumlahnya. Seperti pembebasan pertama yang saya lihat dulu, kali ini juga banyak wartawan dalam dan luar negeri, termasuk Amnesti Internasional. Kami dibawa dengan perahu-perahu motor ke Namlea. Di sini kami harus menunggu kapal yang akan membawa kami meninggalkan pulau ini.

....

Dua hari di Namlea, kapal yang akan membawa kami ke Jawa pun tiba. Kami menaiki "Gunung Jati", nama kapal tersebut, dengan uang saku serta pakaian dan sepatu oleh-oleh dari unit yang belum tentu cocok nomornya. Saya membawa tas plastik berisi perlengkapan alat-alat makan serta sebuah *beseke* untuk membawa titipan naskah-naskah Pak Pram, juga lembar-lembar surat-menyurat saya dengannya, dan beberapa „arsip“ lain. Satu bawaan lagi adalah benda yang seolah tidak berharga tapi sangat berjasa dalam proses kreatif Pak Pram di Pulau Buru. Yaitu cor semen berbentuk tutup *septic tank* untuk mengepres naskah-naskah, yang juga saya masukkan ke dalam *beseke* (Krisdianto, 2015: 178-179).

Perjalanan dari Namlea menuju Surabaya menggunakan kapal "Gunung Jati", kapal yang biasa digunakan untuk mengangkut jamaah haji. Setelah menempuh perjalanan selama tiga hari, kapal Gunung Jati akhirnya merapat di Pelabuhan Tanjung Perak pada tanggal 4 Desember 1978 pukul 09.00. Berbeda saat pertama mereka diasingkan ke Pulau Buru yang penuh dengan tekanan di atas kapal, saat mereka dipulangkan dengan kapal Gunung Jati, mereka bebas berjalan-jalan, melihat pemandangan laut dari atas geladak, juga bisa saling berkunjung. Kondisi kapal jauh lebih baik, kamar mandi dan WC jauh lebih bersih, dan makanan lebih berkualitas, walaupun mereka masih tetap harus tidur di atas tikar (Krisdianto, 2015: 180).

Sebanyak 1350 bekas tahanan politik yang tiba di Tanjung Perak tersebut merupakan bagian dari 4000 orang bekas tahanan yang akan diangkut dalam gelombang pertama Desember 1978. Dari 1350 yang tiba pada tanggal 4 Desember 1978, 805 orang di antaranya berasal dari Jawa Timur dan sisanya dari Jawa Tengah dan Nusa Tenggara. Akan tetapi, bekas tahanan tersebut terdapat 139 di antaranya yang tidak jelas lagi alamat keluarganya di Jawa Timur. Untuk sementara, mereka yang tidak tahu lagi di mana keluarganya sekarang berada, akan diserahkan dulu kepada Dinas Sosial setempat (*Kompas*, 28 Desember 1977).



Gambar 6. Gregorius Soeharsojo Goenito (kiri) dan tahanan lainnya berfoto di atas Kapal Gunung Jati yang membawa mereka dari Pulau Buru ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

Sumber: Gregorius Soeharsojo Goenito, *Tiada Jalan Bertabur Bunga, Memoar Pulau Buru dalam Sketsa* (Yogyakarta: Insist Press, 2016), hlm. 231.



Gambar 7. Tahanan Politik dari Pulau Buru turun dari Kapal Tanjung Pandan yang mengangkut mereka dari Pulau Buru menuju Tanjung Priok Jakarta

Sumber: Kompas, 22-11-1979

Tampaknya kekhawatiran pemerintah atas upaya para mantan tahanan politik menghidupkan kembali paham komunis seperti yang dahulu dituduhkan kepadanya tetap tinggi. Hal ini dibuktikan dengan keharusan para mantan tapol untuk bersumpah yang kemudian dituangkan dalam bentuk surat pernyataan sumpah yang harus mereka tanda tangani. Sumpah tersebut berisi enam poin, yakni:

1. Tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk penyebaran/ pengembangan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-
2. Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya
3. Tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta stabilitas politik
4. Tidak akan berbuat khianat terhadap Bangsa dan Negara RI yang bersendikan Pancasila dan UUD 1945
5. Tetap bersedia dipanggil oleh penguasa untuk dimintai keterangan dan kesediaan menjadi saksi dalam Sidang Pengadilan bila diperlukan
6. Dengan ikhlas saya menerima segala tindakan terhadap diri saya yang telah diambil oleh KOPKAMTIB dalam rangka kebijaksanaan Pemerintah RI di bidang penegakan keamanan dan ketertiban sebagai akibat dari pemberontakan/ pengkhianatan G30S/PKI dan tidak akan melakukan tuntutan atau gugatan terhadap pemerintah RI
7. Sebagai Warga Negara Indonesia, saya dengan ikhlas akan berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta mentaati segala peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak akan bersedia diperalat oleh G30S/PKI dan/atau subversi (Krisdianto, 2015: 181).

KEMBALI KE PROFESI SEMULA

Kembalinya para mantan tahanan politik ke rumah dan kampung halaman masing-masing tidak berarti seluruh persoalan selesai. Salah satu persoalan tersebut adalah bagaimana dan di mana mereka mencari penghidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya? Berkaitan dengan hal ini, Pangkoptik Laksamana TNI Sudomo mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan bekas tahanan atau narapidana G-30-S/PKI untuk kembali kepada pekerjaan atau profesi semula. Namun demikian, mereka yang hendak kembali ke profesi semula, harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain, yang bersangkutan harus memenuhi janjinya seperti yang diucapkan saat pelepasan yakni tidak akan lagi mempersoalkan ideologi komunis yang sudah dilarang dan juga tidak akan berusaha memperjuangkan kepentingan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sudah dibubarkan dan dilarang di Indonesia (*Memorandum*, 16 Agustus 1982). Sementara itu, bagi para pengusaha-perusahaan, lembaga atau badan swasta yang akan menerima para bekas tahanan G-30-S/PKI juga diwajibkan melaporkan kepada Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban-Pelaksana Khusus Daerah (Koptik-Laksusda) bahwa mereka mempekerjakan para mantan tahanan. Selain melaporkan kepada Koptik-Laksusda, pimpinan perusahaan atau lembaga juga berkewajiban mengawasi gerak-gerik para mantan tahanan politik yang mereka pekerjakan (*Surabaya Post*, 11 Agustus 1982; *Jawa Pos*, 12 Agustus 1982).

Walaupun masih harus memenuhi persyaratan, kebijakan tersebut tetap disambut dengan baik oleh berbagai pihak termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Akan tetapi, menurut ketua LBH T. Mulya Lubis kebijakan ini tidak serta merta membuat para mantan tahanan politik tersebut leluasa mencari atau kembali pada pekerjaan atau profesi seperti sebelum dia dibuang ke Pulau Buru. Hal ini disebabkan oleh tiga hal, yakni pertama, di setiap Kartu Tanda Penduduk (KTP) mantan tahanan itu tercantum kode ET (Eks Tahanan G-30-S).

Pencantuman kode ET menyebabkan para mantan tapol kesulitan mencari pekerjaan. Tidak semua perusahaan dan lembaga apalagi institusi pemerintahan bersedia menerima para mantan tahanan untuk bekerja di perusahaan atau kantornya. Kedua,

dalam waktu tertentu mereka mempunyai kewajiban untuk melaporkan diri (wajib lapor) ke kantor Koramil. Menurut keterangan Oei Hiem Hwie – mantan tahanan Pulau Buru – wajib lapor tersebut dilakukan sekali seminggu selama dua tahun (wawancara Oei Hiem Hwie, 29 Juli 2017; *Memorandum*, 16 Agustus 1982). Ketiga, sikap masyarakat yang belum sepenuh hati menerima bekas tahanan tersebut (*Memorandum*, 16 Agustus 1982).



Gambar 8. KTP Berkode ET (Eks Tapol) milik Oei Hiem Hwie
Sumber: Koleksi Pribadi Oei Hiem Hwie

KESIMPULAN

Terdapat paling tidak tiga pertimbangan pemerintah dalam penyelesaian tahanan politik PKI dan pengembalian mereka ke tengah-tengah masyarakat. Pertimbangan tersebut adalah persoalan kemanusiaan, ketiadaan dasar hukum untuk menahan para tapol lebih lama lagi, dan tekanan politik internasional. Pemulangan para tahanan politik, dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1977. Saat itu, 1501 orang bekas tahanan politik golongan B dari Instalasi Rehabilitasi (Inrehab) Pulau Buru tiba di Gapura Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Mereka yang dibebaskan pada tahap pertama ini, berasal dari berbagai daerah, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Barat. Pemulangan tahap kedua berlangsung pada November 1978. Pada gelombang kedua ini sebanyak 1.350 bekas tahanan Golongan B tiba di Surabaya. Mereka merupakan bagian dari 4000 orang bekas tahanan yang akan diangkut dalam gelombang pertama Desember 1978. Dari 1350 yang tiba pada tanggal 4 Desember 1978, 805 orang di antaranya berasal dari Jawa Timur dan sisanya dari Jawa Tengah dan Nusa Tenggara.

Pembebasan tahap ketiga berlangsung pada November 1979. Tahanan Politik dari Pulau Buru tersebut diturunkan di Tanjung Priok Jakarta.

Salah satu persoalan utama yang dihadapi para bekas tahanan politik adalah persoalan penerimaan keluarga dan masyarakat. Bagi keluarga tidak ditemukan persoalan yang berarti. Namun demikian, saat mereka harus menghidupi kembali keluarganya tidak jarang mereka menemukan kendala. Berkaitan dengan hal ini, Pangkopkamtib Laksamana TNI Sudomo mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan bekas tahanan atau narapidana G-30-S/PKI untuk kembali kepada pekerjaan atau profesi semula. Hanya saja, mereka yang hendak kembali ke profesi semula, harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain harus memenuhi janjinya seperti yang diucapkan saat pelepasan yakni tidak akan lagi mempersoalkan ideologi komunis yang sudah dilarang dan tidak akan berusaha memperjuangkan kepentingan PKI yang sudah dibubarkan dan dilarang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Asvi Warman. 2004. "Kejahatan Kemanusiann di Pulau Buru", dalam Hersri Setiawan. *Memoar Pulau Buru*. Magelang: Indonesiatera.
- Aidit, D.N. 1955. *Aidit Menggugat Peristiwa Madiun. Pembelaan D.N. Aidit Dimuka Pengadilan Negeri Djakarta, Tgl. 24 Februari 1955*. Djakarta: Jajasan "Pembaruan".
- Aidit, D.N. 1964. *Kobarkan semangat banteng! Madju terus, pantang mundur!*. Djakarta: Jajasan "Pembaruan".
- Departemen Agitprop CC PKI. 1954. *Buku Putih tentang Peristiwa Madiun*. Djakarta.
- Goenito, Gregorius Soeharsojo. 2016. *Tiada Jalan Bertabur Bung. Memoar Pulau Buru dalam Sketsa*. Yogyakarta: Insistpress.
- Instruksi No. 7 Tahun 1969 tentang Pematangan Masjarakat, Pembinaan, Pendidikan Dan Rawatan Rochani Dlm Rangka Kebidjaksanaan Penjelesaian Tahanan/Tawanan G.30S/PKI" dalam *Legislatief*, No. 11-12/1970.
- Krisdianto, Heru, ed. 2015. *Memoar Oei Hiem Hwie. Dari Pulau Buru Sampai Medayu Agung*. Surabaya: Wastu Lanas Grafika.
- Krisnadi, I.G. 2001. *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*. Jakarta: LP3ES.
- McVey, Ruth. 1968. *The Rise of Indonesian Communism*. Ithaca: Cornell University.
- Roosa, John. 2008. *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Setiawan, Hersri. 2004. *Memoar Pulau Buru*. Magelang: Indonesiatera.
- Setiyawan, Dahlia Gratia. 2014. "The Cold War in the City of Heroes: S.-Indonesian Relations and Anti-Communist Operations in Surabaya, 1963-1965", Disertasi pada Universitas of California, Los Angeles.
- Shiraishi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak. Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Soewarsono. 2000. *Berbareng Bergerak; Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Semaoen*.

Yogyakarta: LKiS.

Tickell, Paul. 2018. "Terciptanya Politik Pembebasan" dalam Fikrul Hanif Sufyan, *Menuju Lentera Merah. Gerakan Propagandis Komunis di Serambi Mekah 1923-1949*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Zed, Mestika. 2004. *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927: Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat*. Yogyakarta: Syarikat Indonesia.

Surat Kabar

Jaya Baya, 24 Desember 1977

Jaya Baya No. 18/XXXIII, 1 Januari 1978

Jawa Pos, 12 Agustus 1982

Kompas, 28-12-1977

Kompas, 7-12-1977

Memorandum, 16 Agustus 1982

Surabaya Post, 11 Agustus 1982

Wawancara

Wawancara dengan Oei Hiem Hwie, 29 Juli 2017 dan April 2019